

PERTARUNGAN NORMA GLOBAL DAN NORMA DOMESTIK:  
ANALISIS KEGAGALAN MASYARAKAT INTERNASIONAL MENGADVOKASI  
BASUKI TJAHAJA PURNAMA KASUS PELECEHAN AGAMA 2017

Oleh Krisna Silawa  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Program Pendidikan Ilmu Hubungan Internasional  
krisna.silawa.2015@fisipol.umy.ac.id

**ABSTRACT**

*Debates of global ideas and domestic norms have occurred in the world, not least in Indonesia. In this study will focus on discussing the debate between global ideas and local conservatism that occurred in Indonesia in the 2017 blasphemy cases. Furthermore, this research also explained the loss of one of idea as an implication of the battle. The research uses deductive explanation methods and non-quantitative methods by collecting accurate information from various reliable sources such as journals, accurate news, and other reliable sources. From this research we get, first local idea was able to build relations with the system so that it won the majority. Second, global ideas have not managed to maintain their value against the local.*

*Keyword: global norms; local norms; conservative; regime of truth.*

---

## **A. Pendahuluan**

Kasus pelecehan agama yang dilakukan Ahok tahun 2017 silam merupakan bukti betapa ternyata tidak mudah gagasan global masuk ke Indonesia, terutama pada perkara kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat yang merupakan salah satu pokok dalam demokrasi yang berasal dari negara-negara Barat benar-benar membebaskan siapa saja mengemukakan pendapat termasuk berpendapat tentang agama di luar apa yang ia percaya. Di negara-negara Barat yang terbiasa memisahkan urusan agama dengan sosial-politik menyebabkan apa yang dilakukan Ahok bukan termasuk sebuah pelecehan atau penghinaan, hanya seseorang yang sedang mengungkapkan pendapatnya. Masyarakat yang setuju dengan anggapan ini menyalahkan dan menuduh masyarakat serta pemerintah Indonesia bahwa telah melukai asas demokrasi. Oleh karena itu mereka meminta Ahok untuk dilepaskan jika memang Indonesia negara demokrasi.

Sayangnya hal ini tidak berlaku di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya masih memegang hukum adat, tidak bisa melepaskan Ahok begitu saja. Dalam masyarakat yang menerapkan hukum adat ada hukum-hukum atau norma tertentu yang dijalankan dan berasal dari sumber-sumber yang berbeda seperti agama, hukum kerajaan atau pemerintahan terdahulu yang pernah berkuasa, atau asililasi budaya negara lain melalui relasi-

relasi yang dibangun. Indonesia dengan wilayah yang luas dan masyarakat yang heterogen menjadikan negara ini terbagi menjadi beberapa wilayah dengan hukum adat yang berbeda. Khususnya di tanah Jawa dimana kasus Ahok terjadi, hukum adat yang di pegang bersumber dari agama Islam sangat kuat. Selain karena pusat pemerintahan, ini yang menjadikan reaksi penolakan terhadap wacana global begitu kuat di wilayah ini.

Dua bentuk tawaran penyelesaian masalah Ahok baik dari masyarakat global maupun lokal merupakan cara-cara masing-masing aktor untuk membentuk rezim kebenarannya. Rezim kebenaran yang digagas oleh Michel Foucault menjadi alat untuk menganalisis perdebatan tersebut. Rezim kebenaran mampu menjelaskan bagaimana penguasaan pikiran dengan suatu wacana mampu mengubah seseorang, kelompok, hingga negara. Rezim kebenaran dihasilkan dari kecintaan Foucault terhadap sejarah, filsafat, dan psikopatologi<sup>1</sup>. Sehingga rezim kebenaran erat kaitannya dengan abnormalitas suatu keputusan terutama pada keyakinan dan pikiran (Afandi, 2012).

Albert Wirya menggunakan rezim kebenaran untuk menganalisa kasus diskursus pendisiplinan pasung pada orang yang terkena penyakit gila. Pada tulisannya *Rezim Kebenaran Rasionalisme dalam Diskursus Kegilaan dan Tindakan Pendisiplinan Pasung sebagai Kejahatan* dijelaskan bagaimana daerah tertentu masih menggunakan pemasungan pada orang yang gila meskipun pemasungan merupakan tindakan yang menghalangi seseorang untuk berkembang dan ini melanggar hak asasi orang tersebut. Secara ilmiah telah dijelaskan dan telah diberikan jalan keluar untuk masalah tersebut namun diskursus tentang kegilaan dan metode pemasungan tetap digunakan (Wirya, 2013). Sama dengan contoh kasus tersebut, pada kasus Ahok lagi-lagi perdebatan kedua gagasan kembali terjadi. Pada kasus ini diskursus agama yang dibawa oleh konservatis lokal Indonesia melawan wacana kebebasan berpendapat yang berasal dari global.

Riset ini didasarkan dengan dua argumen, *pertama* dengan menggunakan menggunakan *regime of truth* maka dalam kasus ini nilai-nilai universal yang diwakili oleh *international society* tidak lebih diakui “kebenarannya” dibandingkan nilai-nilai domestik yang ada. *Kedua*, didukung menggunakan konsep *speech act*, kelompok-kelompok tertentu dalam kasus ini mampu mendapatkan simpati masyarakat, memenangkan mayoritas, sehingga “kebenaran” tersebut mampu terbentuk dan didukung oleh mayoritas.

---

<sup>1</sup> merupakan cabang dari Ilmu Jiwa yang menjadikan gejala kejiwaan sebagai obyek materialnya.

## B. *Literature Review*

Dalam upaya menjelaskan perdebatan antara dua gagasan yang terjadi pada kasus pelecehan agama yang di lakukan Basuki Tjahaja Purnama pada tahun 2017 penulis menggunakan dua perspektif.

### *Regime of Truth*

Konsep *regime of truth* atau rezim kebenaran yang di kenalkan oleh Foucault merupakan suatu konsep tentang "kekuatan-pengetahuan". Konsep ini berakar pandangan *postmodernis* yang merupakan kubu dari kalangan *post-positivist*. *Postmodern* merupakan *anti-fundational approach* yang menolak setiap pondasi keilmuan dari zaman sebelumnya dan menolak sesuatu yang di klaim sebagai kebenaran universal. Sebagai *anti-fundational approach* maka ranah kerja *postmodern* hanya pada bagian konstruksi saja. *Postmodern* hanya mendekonstruksi ilmu-ilmu yang sudah ada sebelumnya (Hicks, 2004).

Epistemologi utama dari *postmodernis* adalah bahasa. Ada dua pertanyaan di sini yaitu apa hubungan bahasa dengan realitas, dan apa hubungannya dengan tindakan? Pertanyaan epistemologis tentang bahasa merupakan bagian dari pertanyaan epistemologis tentang *consciousness* atau kesadaran: Apa hubungan kesadaran dengan realitas, dan apa hubungannya dengan tindakan? Kaum *postmodern* menganggap kesadaran itu fungsional namun tidak kognitif<sup>2</sup>, jadi fungsinya tidak ada hubungannya dengan kognisi (Hicks, 2004).

Bagi *postmodernis*, bahasa tidak bisa bersifat kognitif karena tidak terhubung dengan realitas, baik ke sifat eksternal atau diri yang mendasarinya. Bahasa bukan tentang mengenal dunia, atau tentang membedakan yang benar dari yang salah, atau bahkan tentang argumen dalam arti tradisional validitas, ketegasan, dan probabilitas. Richard Rorty aktor *postmodernis* mengatakan bahwa, tujuan bahasa bukan upaya untuk membuktikan atau menyanggah apa pun namun untuk persuasi tentang sesuatu sesuai versi miliknya (Hicks, 2004).

Gagasan mengenai bahasa ini diakui juga oleh Michael Foucault, bahwa apa yang dikatakan oleh suatu aktor bukan tentang benar atau salah, namun apa yang dikatakan itu diakui oleh pendengar dan menjadi kebenaran itu sendiri, yang ini kemudian disebut *regime of truth*. Melalui konsep *regime of truth*, Foucault menawarkan perangkat dan interpretasi analitik. Pendekatan interpretif dari *regime of truth* menunjukkan

---

<sup>2</sup> kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan (termasuk kesadaran, perasaan, dan sebagainya) atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri.

kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari suatu kejadian. Ia mencoba untuk membuka suatu pemikiran atau gagasan, bukan menyelesaikan suatu masalah (Keeley, 2015). *Regime of truth* merupakan bukti adanya *power of knowledge*. Bahwa seseorang mampu berkuasa bukan lagi hanya dalam sektor-sektor yang *tangible* namun sudah sampai pada sektor *intangible power* yaitu ranah *knowledge/pengetahuan*.

Penguasaan dari *knowledge* berasal dari *discourse/* diskursus/ wacana yang menghegemoni dan dipercaya. Dari sini kemudian terbentuk rezim yang diakui. Diskursus/ wacana bukan hanya pernyataan teoritis namun suatu pernyataan yang terkait dengan praktik sosial. Sehingga diskursus yang kemudian menjadi suatu rezim menyentuh hingga ruang publik tersebut atau ranah tindakan (Keeley, 2015). Menurut pandangan Foucault sebenarnya setiap masyarakat memiliki rezim kebenarannya sendiri. “Politik” yang selama ini berjalan, sebenarnya merupakan suatu diskursus yang diterima oleh masyarakat sehingga menjadikan “politik” itu benar fungsinya (Weir, 2008).

Seperti apa pendapat Foucault mengenai “politik” diatas makan hegemoni-hegemoni yang menjadi suatu rezim yang berhasil ini, kemudian menghadapi persaingan untuk penataan kembali ruang publik tersebut. Rezim yang sudah mapan ini berhadapan dengan alternatif *knowledge/* diskursus yang kemudian bergabung dengan setidaknya kekuatan lokal. Ini cukup untuk menentang wacana dominan atau “*regime of truth*” dan pendukungnya, dan memberikan dasar untuk “*regime of truth*” revolusi (Keeley, 2015).

Struktur dari *regime of truth* sendiri adalah bagaimana hal-hal dibuat untuk muncul, bagaimana mereka dapat diwakili, dan bagaimana hubungan antara hal-hal dan hegemoni diskursus dirumuskan (Weir, 2008). Rezim kebenaran masyarakat kontemporer terdiri dari banyak rumusan kebenaran, bukan hanya kebenaran ilmiah. *Regime of truth* bukan mengenai kebenaran atau fakta ilmiah dari diskursus tersebut, namun bagaimana suatu diskursus diakui kemudian diterima oleh publik dan mendai suatu realitas kehidupan sosial (Weir, 2008).

### ***Speech Act***

Penggunaan konsep *speech act* memperjelas terjadinya *power of knowledge* pada kasus ini. Ketika realitas dalam kehidupan sosial merupakan hasil dari suatu konstruksi maka begitu juga dengan keamanan (*security*) itu sendiri. Konsepsi keamanan pasca Perang Dunia tidak lagi melulu tentang militer, dan negara, namun sudah mengenai hal-hal di luar itu (Hadiwinata, 2017). Isu minoritas-mayoritas, masalah diskriminasi, penguasaan oleh kelompok tertentu, pemerintah yang mengalami krisis legitimasi, dan lain

sebagainya menjadi masalah keamanan baru di dunia (Hadiwinata, 2017). Bagaimana isu-isu baru ini menjadi agenda keamanan atau sekuritisasi (*securitization*) dijelaskan oleh Mazhab Kopenhagen. Menggunakan asumsi konstruktivis, pakar Mazhab Kopenhagen mengatakan bahwa *securitization* merupakan akibat dari adanya konstruksi sosial yang dilakukan oleh agen-agen seperti tokoh masyarakat, aktor NGO/ INGO, pejabat pemerintah, dan lainnya, melalui pernyataan baik ucapan maupun sikap (*speech act*) (Hadiwinata, 2017). Para agen ini mengatakan bahwa “*hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah, adalah sebuah ancaman bahkan tidak hanya nasional namun juga individu*”. Pernyataan ini oleh para agen tersebut disampaikan kepada publik (*target audience*) supaya menjadi tanggapan (*alert*) lalu dari sini menimbulkan dukungan untuk adanya penyelesaian secara darurat (*emergency response*) di luar kebijakan normal (*outside normal policies*) (Hadiwinata, 2017).

Ada tiga hal yang meliputi logika dari *speech act* yang menghasilkan sekuritisasi ini (Hadiwinata, 2017). Pertama karena isu tersebut (non-militer) diklaim keberlangsungan/eksistensinya terancam. Kedua adanya dukungan untuk melakukan penyelesaian/ tindakan untuk menyelesaikan ancaman tersebut. Ketiga ada usaha-usaha untuk meyakinkan *audience* bahwa upaya diluar prosedur normal dibenarkan untuk segera mengatasi ancaman tersebut.

### C. Paradoks Nilai-Nilai Global di Indonesia

Gagasan-gagasan kanan/ konservatif dikatakan muncul sebagai reaksi terhadap laju perubahan politik, sosial dan ekonomi yang tumbuh dan berkembang dalam banyak hal terutama setelah terjadinya Revolusi Prancis. Pada abad kesembilan belas pertumbuhan liberalisme, sosialisme, dan nasionalisme, di negara-negara Barat sangat baik. Sementara ideologi-ideologi tersebut mendukung mengenai revolusi, konservatisme muncul untuk “membela” tatanan sosial tradisional yang semakin “diperangi”. Karakter konservatisme digambarkan sebagai filsafat negatif, dimana tujuannya hanya untuk mengajarkan perlawanan, atau “menaruh kecurigaan” yang besar terhadap suatu perubahan. Perlu diketahui bahwa jika konservatisme sekedar mempertahankan *status quo*, maka konservatisme hanya menjadi sikap politik, bukan suatu ideologi. Banyak orang atau kelompok dapat dianggap “konservatif” dalam arti mereka menolak perubahan, tetapi tentu saja tidak dapat dikatakan meyakini nilai-nilai politik konservatif. Prinsip utama dari gagasan konservatisme adalah meliputi tradisi, ketidaksempurnaan manusia, solidaritas organik, hierarki, otoritas, dan hak milik. Pada praktiknya kaum konservatif berusaha untuk melestarikan berbagai lembaga seperti monarki,

agama, pemerintahan parlementer, dan hak-hak properti, dengan tujuan menekankan stabilitas dan kontinuitas sosial. Versi lebih ekstremnya adalah menentang modernisme untuk kembali ke “hal semula/ apa adanya” (Heywood, 2007). Konservatisme dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya konservatisme paternalistik, konservatisme otoriter, konservatisme libertarian, konservatisme agama/ kepercayaan, dan lain sebagainya. Pada riset ini berfokus pada pembahasan mengenai konservatisme agama/ kepercayaan. Konservatisme jenis ini memiliki landasan yang diambil dari kepercayaan atau agama tertentu. Konservatisme agama ini prinsipnya adalah menerapkan ajaran agama-agama tertentu tersebut ke dalam kehidupan perpolitikan. Pada praktiknya tidak jarang hanya menyatakan nilai dari ajaran-ajaran agama tersebut namun ada masanya untuk memengaruhi hukum yang berlaku (Andersen & Taylor, 2008).

Perkembangan konservatisme baik partai politik dan kelompok masyarakat tidak hanya ada di Eropa maupun Amerika, namun hampir seluruh negara di dunia. Di Indonesia khususnya perkembangan gerakan ada sejak masa sebelum kemerdekaan, dan partai politiknya ada setelah kemerdekaan. Perkembangan konservatisme agama baik partai politik maupun kelompok sempat menurun pada masa Presiden Soeharto. Setelah rezim Soeharto berakhir kebebasan pendukung konservatisme mulai bisa bernafas lega dan berkembang lagi sampai pada masa reformasi ini. Pada era reformasi kelompok dan partai konservatisme lebih leluasa dalam bergerak dan menyampaikan gagasan mereka baik dalam isu sosial sampai pada isu politik. Oleh karena itu kasus pelecehan agama yang dilakukan petinggi pemerintah Indonesia tidak luput dari “kejaran” kelompok konservatisme agama.

Bentuk penyebaran diskursus yang dilakukan oleh konservatisme di Indonesia tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh kaum globalis. Gagasan-gagasan konservatisme menyebar melalui gerakan-gerakan mereka bentuk. Baik pemimpinnya hingga anggota semua turut andil dalam penyebaran gagasan yang mereka percaya. Buktinya, sebagai salah satu gerakan konservatisme di Indonesia, pada tahun 2008 Sekretaris Jenderal FPI Shabri Lubis memberikan pidato di pertemuan umum yang dilaksanakan di Banjar, Jawa Barat. Dalam pidatonya, ia menyebutkan dengan lantang, “*Bunuh pengikut Ahmadiyah. Hapuskan pengikut Ahmadiyah. Masa bodoh dengan HAM. Kalau ada apa-apa, saya yang bertanggung jawab. Bilang saya yang tanggung jawab.*” (DetikNews Staff, 2008).

Beberapa bukti lain diskursus konservatisme yang diwakili oleh FPI adalah pada tahun 2012 mereka memiliki spanduk-spanduk yang berada di dekat kantor pusat FPI Jakarta. Mereka meletakkan spanduk besar di ruang publik dimana dapat dilihat banyak orang. Spanduk-

spanduk tersebut bertuliskan bagaimana FPI memandang liberalisme yang kebanyakan diambil langsung dari buku Rizieq Shihab. Selain itu juga di spanduk lainnya secara terang-terangan menentang liberalisme dan pendukungnya. Mereka berargumen bahwa liberalisme merupakan ancaman paling berbahaya untuk Islam di Indonesia (Woodward, et al., 2014). Kemudian pada tahun 2017 ketika pertemuan kenegaraan antara Indonesia dan Sekjen Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong yang membahas mengenai kerjasama di berbagai bidang antar kedua negara. Beberapa hari sebelum pertemuan itu dilaksanakan Rizieq Shihab memberikan pidato dalam acara Milad FPI ke-19. Dalam pidatonya ia menyampaikan bahwa masyarakat dan pemerintah untuk tidak melakukan kerja sama dalam kebatilan (Syakur, 2017).

Pidato ini mengisyaratkan penolakan terhadap pertemuan kedua negara yang akan dilakukan. Hal ini dikarenakan FPI anti terhadap segala hal mengenai komunisme dan liberalisme. Dalam pidatonya, Rizieq mengutip surat Al-Maidah ayat 2. Selain itu ia juga mengatakan, *“Ingat, diakui atau tidak diakui, saat ini FPI telah menjadi ikon amar makruf nahi mungkar. Ini adalah karunia Allah Subhanahu Wata’ala yang wajib disyukuri,”* (Syakur, 2017). Pada tahun yang sama, Shabri Lubis juga menyinggung mengenai ABI yang sempat mendapatkan penolakan dari berbagai pihak. Dalam orasinya di Tabligh Akbar Garut ia mengatakan bahwa Allah telah memberikan kekuatan kepada umat Islam untuk membangun *ukhuwah* Islamiyah dan persatuannya (Muhtadin, 2017). Pidatonya ini mengandung makna bahwa gerakan FPI akan selalu mendapat dukungan dari Tuhan, kekuatan diatas manusia. Ini membuat orang-orang percaya dan kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh FPI yang kemudian menarik lebih banyak lagi masa untuk bergabung dengan FPI.

Selain melalui pidato-orasi, FPI juga tidak sedikit mengeluarkan buku. *Hitam Putih FPI: Mengungkap Rahasia-Rahasia Mencengangkan Ormas Keagamaan Paling Kontroversial*, kemudian *PKI: Apa dan Bagaimana, Hancurkan Liberalisme Tegakkan Syariat Islam*, dan lain sebagainya. Buku-buku ini berisi tentang bagaimana cara pandang dan tanggapan FPI terhadap wacana lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu bagaimana FPI menyalurkan wacananya adalah dengan menampilkan penampilan yang “baik” menurut Islam. Dimana FPI dan anggotanya cenderung menggunakan jubah putih dengan sorban<sup>3</sup> di kepala mereka yang diadopsi dari bagaimana cara nabi berpakaian (Woodward, et al., 2014). Ini untuk mencitrakan

---

<sup>3</sup> kain ikat kepala yang lebar (yang dipakai oleh orang Arab, haji, dan sebagainya).

kebaikan dan kesucian umat Islam sehingga akan banyak orang yang tertarik untuk mengenal FPI dan kemudian bergabung dengan mereka.

Meskipun sering ditantang, dikafirkan, dan ditolak oleh kaum konservatis dan pengikutnya, gagasan global masih mencoba bertahan di Indonesia. Bahkan sebenarnya beberapa gagasan globalis tidak sejauh itu berbeda dengan landasan Islam yang dipercayai oleh kaum konservatis. Seperti pluralisme yang ingin menghilangkan paham primordialisme dan eksklusivisme yang sedikit banyak memicu masalah-masalah kemanusiaan. Nilai-nilai yang ada mengikuti pluralisme seperti kebebasan, keadilan, persamaan hak, dan lain sebagainya dijadikan inti/pokok sistem sosial baru—*international society*. Nilai-nilai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam demokrasi dan HAM. Sesungguhnya gagasan-gagasan tersebut tidak bertentangan dengan nilai Islam. Karena di dalam Islam dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku (plural) untuk berinteraksi sosial. Bahkan pada masa kenabian dibuat Piagam Madinah yang dibuat antara muslim dan orang non-muslim—Yahudi. Dimana pada piagam ini memuat pasal-pasal, aturan, kesepakatan sosial antar mereka. Selain itu pada ajaran Islam juga diajarkan bahwa yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya bukan dari ras, etnis, kekayaan, jabatan, dan lainnya, melainkan tingkatan keimanan/ketakwaan kepada Tuhan (Abdurrazaq, 2018).

Masalah ini juga diyakini oleh Hans Kung. Ia mengatakan bahwa etika-etika global dapat diterapkan sebagai kesepakatan dasar yang berkaitan dengan nilai-nilai yang mengikat, standar yang tidak dapat diubah, dan sikap-sikap moral, yang dapat diterima oleh semua agama bahkan yang tidak beragama. Hans beranggapan bahwa sangat tidak mungkin jika tatanan pluralisme maupun etika global dipertimbangkan sebagai pengganti Taurat, Al-Quran, Bhagavadgita atau wacana Buddha. Menurutnya juga perdamaian antar bangsa tidak akan tercapai tanpa perdamaian antara agama, dan hal tersebut tidak bisa jika tanpa etika global (Küng, 1996).

#### **D. Rezim Kebenaran Pelecehan Agama dalam Diskursus Konservatisme dan Diskriminasi sebagai Kejahatan Politik**

Kasus perdebatan antara gagasan global dan konservatis di Indonesia tidak berbeda jauh dengan studi kasus praktik pengasingan orang gila dengan orang normal dari karya Foucault. Hal yang sama terjadi pada kasus pelecehan agama yang dilakukan Ahok. Gagasan global yang dibawa oleh *international society* tidak mendapatkan dukungan dari sistem di Indonesia. Dengan kata lain mereka tidak mampu membangun relasi dengan sistem yang ada. Sedangkan dari pihak konservatis agama, mereka bukan hanya membangun relasi dengan satu pihak. Konservatis mampu membangun relasi baik dengan masyarakat, organisasi, hingga sistem

pemerintah di Indonesia. Sehingga gagasan konservatis Islam menang atas globalis terlepas dari kebenaran atau salah dari tiap gagasan tersebut dalam memandang kasus pelecehan agama yang dilakukan Ahok.

Oleh Foucault kekuasaan selalu berkaitan dengan suatu kebenaran, dan kebenaran berhubungan dengan ilmu pengetahuan/ *knowledge*. Keinginan untuk menyatakan atau memberikan suatu kebenaran sama besar dengan keinginan untuk berkuasa. Dari keterkaitan antara kekuasaan dan *knowledge* maka menurut Foucault, ilmu pengetahuan tidak akan pernah netral dan murni. Penjelasan ilmu selalu berusaha menguasai dengan mengeliminasi penjelasan ilmu yang lain untuk menentukan kebenaran menurut versinya dan menciptakan kekuasaan. Ini yang kemudian dimaksud dengan diskursus pengetahuan oleh Foucault. Diskursus adalah kejadian maupun benda yang berfungsi untuk menguasai kehidupan sosial dan budaya (Afandi, 2012).

Untuk menjelaskan pemikirannya tersebut Foucault tidak melepaskan kerangka psikoanalisis<sup>4</sup>. Dalam psikoanalisis dijelaskan bahwa manusia selalu berada dalam ketidaktahuan dan ketidaksadaran ketika berada dalam tekanan sistem konteksnya. Arti dari sistem konteks di sini adalah sistem sosial, sistem politik dan sistem budaya. Jadi individu sebenarnya tidak berfikir dan menciptakan suatu pengetahuan/ nilai murni namun yang terjadi adalah sebaliknya. Sistem tersebut yang berpikir dan membentuk suatu pengetahuan/ nilai melalui individu tersebut untuk membentuk kebenaran dan akhirnya menciptakan kekuasaan (Afandi, 2012).

Kasus pelecehan agama ini merupakan kasus yang satu garis dengan pendapat Foucault bahwa pada umumnya filsuf klasik mengaitkan kekuasaan dengan kebaikan, kebajikan, keadilan dan kebebasan. Sedangkan para pemikir religius menghubungkan kekuasaan tersebut dengan Tuhan. Pemikiran filsuf klasik ini yang menjadi pokok gagasan global. Sedangkan konservatis agama Islam menghubungkan kekuasaan dunia berada di tangan Tuhan yang diterjemahkan melalui kitab-kitabNya. Kemudian keduanya sama-sama berlomba membangun relasi berbagai sistem di Indonesia. Namun tingkatan keberhasilan mereka membangun relasi dan membentuk kebenaran di Indonesia tidak sama dan ini dimenangkan oleh konservatis Islam.

---

<sup>4</sup> cara untuk mendapatkan secara terperinci pengalaman emosional yang dapat menjadi sumber atau sebab gangguan jiwa dan represinya

Wacana konservatis mendapatkan keistimewaan di Indonesia. Dengan mayoritas penduduk muslim tidak sulit bagi mereka untuk diamini kebenarannya. Konservatis Islam di Indonesia mampu memenangkan simpati masyarakat hingga pemerintah. Mereka tidak hanya mampu menguasai sistem sosial namun juga mampu mendorong pemerintah Indonesia untuk menerapkan nilai Islam dalam sistem pemerintahan bahkan pada hukum yang berlaku. Kelompok-kelompok Islam di Indonesia juga banyak berkembang, dari yang mendapat julukan Islam moderat hingga radikal/ garis keras. Oleh karena itu ucapan Ahok membuat marah kaum konservatis Islam dan menuntut agar Ahok dihukum penjara. Dengan menggunakan masyarakat, konservatis mendesak pemerintah cepat tanggap dalam kasus ini.

Melihat hal tersebut berlangsung, kaum globalis mencoba untuk “ikut campur” dengan membawa gagasan bahwa Ahok merupakan korban kejahatan politik di Indonesia (Manurung, 2018). Mereka mengatakan bahwa Ahok sebenarnya hanya mengalami *double-discrimination* dimana ia merupakan umat Kristiani dan ditambah merupakan keturunan Tionghoa. Kasus Ahok ini dianggap sebagai pijakan untuk elit tertentu melengserkan Ahok dari jabatannya, dan menghalangi supaya tidak bisa melanjutkan kiprahnya di dalam pemerintahan Indonesia. Mereka juga berargumen bahwa Ahok hanya korban dari orang-orang yang tidak sesuai dengan model kepemimpinannya, pemberantasan korupsi yang sering dilakukan. Pendukung wacana global mengatakan bahwa isu ini diangkat dan didukung oleh mereka yang korup dan takut dilepas jabatannya oleh Ahok. Kaum globalis juga menambahkan isu pelecehan agama yang dilakukan Ahok ini terjadi pada masa panas, untuk pergantian gubernur Jakarta. Oleh karenanya *international society* lebih gencar lagi mempertanyakan apakah pembelaan agama Islam ini murni untuk membela Islam atautkah merupakan satu cara untuk melengserkan Ahok. Selain itu kaum globalis juga mengatakan bahwa setiap orang bebas mengutarakan pendapatnya, termasuk Ahok. Apa yang diucapkan Ahok merupakan bentuk pengekan dalam berpendapat, terlebih lagi isu ini muncul akibat dari rekayasa unggahan *video* oleh oknum tertentu (Manurung, 2018).

Bahkan beberapa pakar sosial dan politik mendukung argumen bahwa kasus ini merupakan salah satu pematik terkuat berjayanya kembali konservatisme di Indonesia, dan kembali menguatkan politik identitas di Indonesia. Penolakan pembelaan murni atas Islam, diungkapkan oleh Muhammad Asfar yang merupakan pengamat politik kepartaian dari Universitas Airlangga. Asfar mengemukakan bahwa kasus Ahok hanyalah reaksi sporadis terhadap model kepemimpinan Ahok dan bukan merupakan kebangkitan politik kanan (Siregar, 2017).

Selain itu Ward Berenschot seorang peneliti demokrasi dan identitas politik juga mengungkapkan bahwa ada aksi-reaksi negatif antara Islam (tengah kanan-konservatis) dan non-Islam (tengah kiri-globalis) yang merupakan buntut panjang dari isu terorisme dan isu politik yang diajukan Donald Trump, anti Islam dan anti imigran yang meningkat. Dari situ kemudian menimbulkan reaksi dari rakyat beberapa negara untuk “membela Islam dan melawan musuh-musuh Islam”. Sayangnya ini kemudian benar-benar dimanfaatkan oleh elit tertentu. Sehingga ketika masalah muncul dan keadaan dirasa tidak aman maka politik identitas akan muncul. Politik identitas menjadi sangat menarik karena membantu memberikan rasa aman kepada mereka yang percaya terhadap identitas tertentu (Siregar, 2017).

Pemanfaatan kasus pelecehan agama oleh elite tertentu semakin kuat dengan pernyataan Asfar mengenai mekanisme pemilihan pemimpin di Indonesia. Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir tidak banyak politikus yang menitikberatkan ideologi untuk dipilih melainkan pada kemampuan berpolitik. Sehingga mereka dipilih karena keterampilan dan memberikan ekspektasi yang baik. Selain itu ini juga didukung oleh peningkatan literasi masyarakat Indonesia sehingga memilih berdasarkan kalkulasi-kalkulasi rasional lebih dipilih (Siregar, 2017).

Survei juga dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama dengan tim Litbang Kompas di 34 provinsi yang melibatkan 1.207 responden. Mereka melakukan survei untuk mengetahui potensi segregasi sosial berdasarkan ras dan etnis di Indonesia. Dari survei tersebut menghasilkan sebanyak 58,5 persen responden mengatakan bahwa masih mendengar pidato yang bernada diskriminatif. Selain itu 82,7 persen responden cenderung merasa lebih nyaman jika tinggal bersama dengan sesama rasnya. Bahkan berdasarkan survei tersebut, 83,1 persen responden memilih tinggal bersama dengan sesama sukunya (Tempo Staff, 2018). Bahkan isu diskriminasi ini juga diamini oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dan selalu meningkat pada musim-musim pergantian pemimpin. Elsam mengatakan bahwa pada pemilu tahun 2019 diskriminasi berdasarkan etnis dan ras akan meningkat. Peningkatan diskriminasi ini tidak lepas karena politik identitas menguat di masa kampanye. Dibanding isi-isu substantif atau programatis si calon pemimpin, isu mengenai simbolisme dan personifikasi orang jauh lebih penting. Menurut Elsam ini yang memicu penggunaan isu-isu keagamaan, suku, dan etnis pada model-model kampanye. Munculnya diskriminasi juga diperkuat dengan arus internet yang memudahkan orang untuk berkampanye sedangkan kampanye mereka menitikberatkan isu-isu simbolitas dan identitas. Ini mempermudah terbentuknya *hate speech* yang mengarah kepada ajakan untuk melakukan

kekerasan verbal dan atau fisik kepada etnis dan kelompok agama tertentu (Wardah, 2018). Ini membuktikan kekonservatisan Indonesia yang kuat.

Penyelenggaraan Miss World 2013 di Indonesia juga mengalami penolakan dari kelompok konservatis Islam. Kontes kecantikan dunia tersebut pada awalnya akan diselenggarakan di Sentul Bogor, Jawa Barat. Bahkan setelah dipindahkan lokasinya aturan busana diperketat. Acara tersebut dilarang menggunakan bikini dan pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan tidak mempermasalahkan pemindahan lokasi diselenggarakannya Miss World begitu juga dengan pemerintah daerah Bali. Bahkan aturan pelarangan bikini yang diganti dengan kain adat Bali dianggap sangat baik karena menambah nilai jual Bali (BBC Staff, 2013). Pemindahan lokasi acara merupakan akibat dari penolakan dan ancaman dari kelompok konservatis agama. Salah satu perwakilan dari kelompok konservatis dalam demonstrasinya di Bundaran Hotel Indonesia, menyatakan bahwa kelompok dan pendukung siap berperang dan angkat senjata untuk membatalkan kontes tersebut jika benar di laksanakan di Bogor. CEO MNC Group Harry Tanoesoedibjo mencoba bernegosiasi agar Miss World tetap diadakan di Sentul. Namun akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pada saat itu berkuasa memutuskan untuk memindah lokasi acara (Keteng, 2013).

Selain itu banyaknya persekusi dan aksi-aksi kekerasan verbal dan fisik yang melibatkan kelompok konservatis dan kelompok lain juga menjadi bukti betapa Indonesia belum menerima demokrasi sesungguhnya. Bahkan salah satu ulama dari kelompok konservatis Islam, Misbahul Anam secara terang-terangan mengatakan bahwa menurut ia Indonesia bukanlah negara demokrasi melainkan negara musyawarah. Ia mengatakan bahwa demokrasi dan musyawarah berbeda. Selain itu dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan mayoritas pemeluk Islam, maka pemimpin harus beragama Islam (BBC Staff, 2017).

Masih tercatat kasus-kasus yang melibatkan kelompok konservatis Islam dalam melawan pandangan-pandangan yang tidak sesuai kepercayaan mereka. Bahkan persekusi tidak hanya disasarkan pada kelompok lain berbeda agama namun juga pada kelompok-kelompok berbasis Islam namun berbeda *mazhab*/ aliran. Pengamat dari Universitas Paramadina Budhy Munawar Rachman mengatakan bahwa FUI merupakan organisasi yang menggunakan kekerasan baik verbal dan fisik, melakukan ujaran kebencian hingga kekerasan fisik dalam melakukan aksi-aksi mereka. FUI dikenal dengan keantiannya kepada Ahmadiyah, Syiah, Gafatar. Mereka juga melaku aksi penolakan terhadap tempat ibadah lain yang tidak berizin (Aziz, 2017).

Persekusi terhadap kelompok Gafatar juga merupakan salah satu bukti betapa konservatisnya Indonesia, baik masyarakat hingga pemerintah. Gafatar mendapatkan kriminalisasi dengan pola fatwa sesat lalu penjara. Gerakan mereka juga dituduh menjurus pada upaya-upaya makar dan keinginan untuk merubah bentuk negara Indonesia. Menurut pimpinan Ghafatar hal ini tidak benar karena berdasarkan aliran yang mereka percaya ada larangan untuk melawan penguasa. Selain itu pada kasus tuduhan penculikan salah satu dokter di Yogyakarta kepada Gafatar yang mengakibatkan anggotanya dipenjara juga merupakan bukti ketidak netralan pemerintah dalam mengusut permasalahan keagamaan. Secara hukum dokter yang dianggap diculik tersebut sudah melampaui batas umur untuk bebas menentukan keyakinannya sendiri. Selain itu menurut para anggota, dokter tersebut secara sadar mengikuti Gafatar (Kresna, 2017).

Persekusi tidak hanya terjadi pada Gafatar, namun juga pada kelompok Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), dan Syiah Sampang Madura. Persekusi yang terjadi pada kelompok-kelompok tersebut bukti kegagalan pemerintah sebagai negara hukum. Untuk melindungi kebebasan memeluk kepercayaan dan berorganisasi. Selain itu juga merupakan bukti ketidak sempurnaan dan efektifan peraturan mengenai pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Bahkan persekusi yang dilakukan kelompok terhadap kelompok lainnya menimbulkan masalah lain seperti kekerasan berbasis gender, psikis, seksual, hingga ekonomi. Ini dikarenakan mereka diusir dari tempat tinggal, dikucilkan, dan mendapatkan diskriminasi lainnya (Novianto, 2018).

Menurut koordinator lembaga non-pemerintah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani persekusi berbasis keagamaan terus terjadi akibat dari kasus Ahok. Penganiayaan pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah, penganiayaan hingga meninggal Ustad Prawoto petinggi Persatuan Islam (Persis) Bandung. Persekusi Bksu Mulyanto Nurhalim di Banten, yang dituduh menjadikan rumah sebagai tempat ibadah. Penyerangan di Gereja St. Lidwina di Yogyakarta yang melukai Pastor Karl-Edmund Prier, anggota kepolisian, dan beberapa orang lain. Menurut Kontras, sepanjang tahun 2017 tercatat ada 75 peristiwa kekerasan berdimensi agama dan keyakinan. Empat daerah tercatat menjadi wilayah dominan terjadinya persekusi atas nama agama dan keyakinan, Jawa Barat dengan 17 peristiwa, Jawa Tengah 13, Jawa Timur 7, dan Banten 7 peristiwa (Amindoni, 2018).

Konservatis Islam bisa begitu kuat mempengaruhi tiap sektor kehidupan di Indonesia tidak luput dari dukungan banyak pihak. Diawali dengan pokok gagasan yang memang kuat. Ajaran agama Islam memang sudah ada bahkan jauh sebelum gagasan-gagasan global berkembang.

Adanya kepercayaan kekuatan diluar batas rasional manusia menjadi ketakutan tersendiri bagi orang-orang yang meyakini. Dengan mayoritas penduduk yang menganut Islam memperumuh penetrasi ajaran-ajaran Islam. Karenanya sangat mudah bagi siapa saja untuk dipermasalahkan di sosial hingga hukum jika itu menyangkut agama Islam. Ini juga tidak lepas dari dukungan pemerintah terhadap konservatisme baik melalui hukum/ undang-undang maupun peraturan daerah. Seperti hukum waris menurut Islam, hukum tentang Perkawinan, tentang Wakaf, Zakat, Haji, dan masih banyak hukum lainnya yang berdasarkan asas Islam.

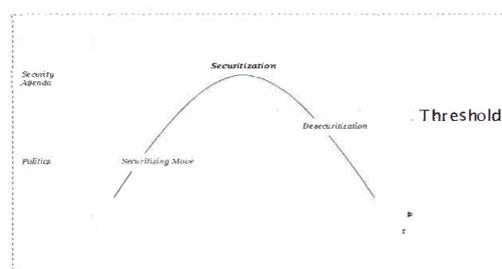
Integrasi nilai-nilai Islam dengan landasan hukum di Indonesia sudah terjadi sejak lama, pada masa kemerdekaan. Oleh karena itu hukum Islam menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat dan menjadi bagian dari hukum nasional. Islam dan hukum nasional tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain (Yani, 2018). Oleh karena itu pada masalah pelecehan agama yang dilakukan Ahok sangat mudah bagi kelompok konservatis untuk memperkarakannya.

#### **E. *Speech Act* dalam “Keberhasilan” Kelompok Konservatif di Indonesia**

Ketika berbicara mengenai isu-isu di era kontemporer maka kekuasaan tidak melulu tentang masalah-masalah *high politics*. Seperti apa yang dijelaskan Mazhab Kopenhagen bahwa konsep kekuasaan mengalami perluasan dan pendalaman setelah Perang Dingin. Masalah lingkungan, kemanusiaan, diskriminasi, kebebasan, dan sebagainya menjadi masalah yang sering diperbincangkan setelah perang dunia mengakibatkan banyak kerusakan dan masalah baru di seluruh penjuru dunia. Masalah ini tidak hanya menjangkit negara-negara kalah perang melainkan juga kepada mereka yang menang perang (Hadiwinata, 2017).

Meskipun begitu pada saat itu nyatanya masih banyak negara-negara yang beranggapan bahwa militer dan politik adalah sumber kekuatan nomor satu. Sampai pada dimana bermunculan aktor-aktor yang mampu menjadikan isu-isu non-tradisional ini penting dan mendesak agar segera mendapatkan penyelesaian masalahnya. Proses ini kemudian disebut sekuritisasi oleh para pakar Mazhab Kopenhagen, dimana didalamnya ada yang dinamakan *speech act* (Hadiwinata, 2017).

Gambar 3.1. Proses Sekuritisasi Mazhab Kopenhagen



Sumber: Studi dan Teori Hubungan Internasional, Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis

Jadi proses sekuritisasi adalah usaha meningkatkan urgensi suatu isu diluar isu keamanan, namun dengan suatu pernyataan atau *speech act* kepada masyarakat, audiens, atau publik melalui media, seminar, pidato, dan segala bentuk pertemuan lainnya sampai batas dimana “ancaman” tersebut sudah bukan lagi merupakan ancaman. Kemudian baru dilakukan desekuritisasi agar audiens tidak mengalami panik yang berlebih. Keberhasilan suatu sekuritisasi apabila empat syarat terpenuhi (Hadiwinata, 2017).

Empat syarat tersebut adalah kemampuan untuk meyakinkan masyarakat atau publik bahwa isu tersebut merupakan ancaman terhadap keamanan bersama. Kemudian pernyataan tersebut tentu harus meyakinkan. Sasaran harus benar-benar yang mampu memahami pernyataan yang diberikan oleh si aktor/ pelaku sekuritisasi. Terakhir adalah kesinambungan antara pernyataan dan konteks atau isu yang akan disekuritisasikan. Ketika keempat syarat ini terpenuhi maka proses sekuritisasi isu akan berhasil (Hadiwinata, 2017).

Proses sekuritisasi sudah sering terjadi di berbagai negara seperti pada kasus penyebaran virus Ebola di Afrika yang membuat *United Nations* dan *World Health Organization* mendesak negara-negara lain untuk berhati-hati. Sehingga beberapa negara lebih memperketat izin keluar masuk kenegarannya jika mereka dari wilayah-wilayah yang terkena wabah Ebola. Selain itu kasus ketahanan pangan yang terjadi di zona riparian Sungai Mekong juga mengalami sekuritisasi. Kemudian di Indonesia proses sekuritisasi terjadi pada kasus penyebaran virus flu burung dan isu kemiskinan menjelang pemilu tahun 2014.

Sekuritisasi juga kembali terjadi di Indonesia pada kasus pelecehan agama yang dilakukan Ahok. Proses sekuritisasi dilakukan oleh kelompok konservatif Islam di Indonesia. Keberhasilan proses sekuritisasi oleh konservatis Islam karena kemampuan kelompok konservatis untuk melakukan empat syarat keberhasilan sekuritisasi sebagaimana yang tercantum dalam buku Bob Sugeng.

Kelompok-kelompok konservatis Islam mampu untuk meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa apa yang dilakukan oleh Ahok benar-benar melecehkan Islam. Sehingga mereka meyakinkan atau mendorong masyarakat untuk melakukan gelombang protes yang berakhir sebagai mendesak terhadap pemerintah untuk segera menghukum Ahok. Bahkan pemimpin-pemimpin kelompok konservatif tidak ragu untuk menyampaikan bahwa apabila Ahok tidak dihukum maka gelombang protes tidak akan pernah benar-benar berakhir, bahkan lebih dari itu mereka mengancam akan melakukan hal-hal yang lebih berani dibanding hanya sekedar

aksi protes/ demonstrasi. Dengan hal-hal tersebut, kelompok konservatis mampu membentuk opini masyarakat bahwa kasus ini benar-benar mendesak, sehingga bagi mereka baik yang pro maupun kontra tanpa sadar tergiring pada keinginan untuk proses hukum bagi Ahok segera selesai.

Kemudian pernyataan-pernyataan atau *speech act* yang dilakukan pimpinan-pimpinan konservatif lebih meyakinkan dibanding masyarakat internasional maupun aktor-aktor, pakar, sampai lembaga pemerintah di dunia. Hal ini tidak terlepas dari kesinambungan antara isu atau masalah yang diajukan dengan konteks isu itu sendiri. Maksudnya adalah antara aktor yang melakukan sekuritisasi, pernyataan isu yang disekuritisasi, dan konteks-konteksnya sesuai. Dalam kasus pelecehan Islam tersebut, perwakilan-perwakilan konservatis Islam melakukan *speech act* atau memberikan pernyataan berdasarkan atau berlandaskan nilai-nilai Islam. Mereka yang melakukan *speech act* menampilkan performa terbaik dengan menggunakan atribut-atribut Islam, dan hal-hal tersebut sesuai dengan anjuran Islam dan *sunnah* Nabi seperti penggunaan jubah, sorban, tasbih, dan sebagainya. Kemudian isunya sendiri merupakan masalah Islam, dan terjadi di negara dengan mayoritas Islam. Dengan terjadinya isu di negara yang mayoritas masyarakatnya Islam lengkap sudah empat syarat keberhasilan sekuritisasi. Dengan masyarakat yang memiliki dasar yang sama atau pengetahuan yang sama, disini Islam, tidak sulit bagi konservatis Islam untuk menguasai masa.

Berbeda dengan masyarakat global, dimana mereka tidak melengkapi keempat syarat tersebut. Aktor-aktor dari global tidak benar benar meyakinkan dalam memberikan *speech act*. Bahkan salah satu ulama di Indonesia yang “membela” Ahok beritanya tidak semeriah mereka yang kontra. Hal ini dikarenakan tidak adanya kesinambungan antara isu dan konteksnya. Sehingga pada akhirnya gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh global, dalam kasus ini tidak bisa mendesekuritisasi apa yang dilakukan konservatif.

#### **F. Benturan Gagasan Global dan Lokal Dalam Demokrasi Indonesia**

Dengan berkembangnya isu-isu di dunia, kekuasaan yang nampak atau fisik seperti keamanan militer, antar wilayah, perkembangan infrastruktur dan ekonomi, bukan lagi cara pasti dalam “menguasai” aktor lainnya. Namun pada era post-ideologi ranah metafisik seperti budaya, *civilization*, diskursus wacana menjadi cara ampuh dalam menguasai aktor lainnya. Kajian pada hubungan internasional kemudian juga berkembang mengikuti perubahan zaman dan memunculkan pemikir-pemikir ranah *ideoscape*. Banyak pemikir dunia seperti Hans Kung dan Michel Foucault yang menyetujui bahwa ranah ide atau pikiran mampu menguasai manusia dan sistem yang ada.

Pergeseran masalah antar negara ini telah “diramalkan” oleh Samuel Huntington. Huntington mengatakan bahwa *clash of civilization* akan menjadi fase terbaru dalam evolusi konflik di dunia modern dan ini tidak akan terhindarkan. Argumen ini juga disetujui oleh R.R Palmer, di tahun 1793 ia mengatakan bahwa perang antara raja sudah berakhir dan konflik antar manusia sedang mulai (Huntington, 1996).

Terjadinya *clash of civilization* oleh Huntington dijelaskan secara rinci ada lima sebab. *Pertama*, perbedaan antar peradaban tidak hanya nyata namun perbedaan ini sangat dasar–*basic*. *Civilization* yang merupakan pembedaan seseorang dari lainnya melalui sejarah, bahasa, budaya, tradisi dan yang paling penting adalah agama/ kepercayaan akan hampir selalu berbeda dalam memandang satu hal yang sama. Perbedaan ini merupakan hasil dari peradaban dan tidak akan hilang dalam waktu dekat. Mereka jauh lebih fundamental dari perbedaan ideologi dan rezim politik. *Kedua* karena dunia menjadi lebih kecil. Interaksi antara orang-orang dari berbagai peradaban meningkat; meningkatnya interaksi ini meningkatkan kesadaran peradaban dan kesadaran akan perbedaan antara peradaban dan kesamaan dalam peradaban. *Ketiga*, proses modernisasi ekonomi dan perubahan sosial di seluruh dunia, memisahkan orang dari identitas lokal yang lama yaitu negara bangsa sebagai sumber identitas. Di sebagian besar wilayah dunia, identitas keagamaan mengisi celah yang terjadi di pemisahan identitas lama dan sering kali bentuk gerakan mereka dilabeli "fundamentalis." *Keempat* adalah pertumbuhan kesadaran-peradaban yang ditingkatkan oleh peran ganda dari Barat. Peran ganda yang dimaksud adalah ketika Barat sebenarnya ada di puncak kejayaan tapi mereka seperti kembali ke “awal” karena banyaknya kegagalan mereka untuk *spread the “culture”* buktinya adanya Asianation di Jepang, kegagalan demokratisasi di Timur, dan lain sebagainya. *Kelima*, karakteristik dan perbedaan budaya kurang bisa berubah dan karenanya kurang mudah dikompromikan dan diselesaikan daripada yang politik dan ekonomi. *Terakhir* adalah regionalisme ekonomi meningkat yang memicu identitas regional (Huntington, 1996).

Ketika seseorang mulai mendefinisikan identitas dalam istilah etnis dan agama, mereka cenderung melihat hubungan dengan “kita” versus “mereka”. “Kita” merupakan orang-orang yang ada di antara mereka dan “mereka” merupakan orang-orang dari etnis atau agama yang berbeda. Perbedaan budaya dan agama menciptakan perbedaan atas isu-isu kebijakan, mulai dari hak asasi manusia, imigrasi, perdagangan, hingga lingkungan, dan isu lainnya (Huntington, 1996). *Clash of civilization* antara identitas “kita” dan “mereka” yang mencolok adalah konflik “the West” versus “Islam”. *Clash of civilization* antara dua identitas besar dikatakan kembali mulai menguat setelah kasus 9/11 atau penyerangan gedung kembar pusat ekonomi (*World*

*Trade Center*) di Amerika. Munculnya kasus penyerangan ini menjadi pematik munculnya isu-isu identitas “kamu barat dan aku Islam, siapa yang kafir dan siapa yang Islam, siapa yang mau berkuasa dan siapa yang dijahati” yang intinya memperdebatkan identitas ajaran Islam melawan identitas sekuler milik Barat.

Masalah identitas ini terjadi di seluruh bagian dunia baik terutama di wilayah timur yaitu Asia tak terkecuali di Indonesia. Bentrok identitas yang terjadi di Indonesia yang paling mencolok adalah pada kasus pelecehan agama yang dilakukan oleh Ahok. Namun yang terjadi bukan identitas lokal yang resisten namun yang terjadi adalah *global norms* yang dianggap mengganggu ketenangan norma lokal di Indonesia yang kemudian mendapatkan perlawanan balik dari *local norms*. Kasus bentrok identitas ini menyeret dua identitas besar yaitu *global norms* dan *local norms*. *Global norms* membawa asas kebebasan berpendapat dari demokrasi untuk menyerang norma lokal. Sedangkan lokal membawa identitas Islam konservatif untuk melawan diskursus yang coba dibentuk oleh global. Pada kasus ini konservatis lokal tidak muncul sebagai akibat dari globalisasi yang masuk, namun nilai-nilai global yang ikut campur dan mengganggu masalah interen lokal.

Posisi Ahok di sini terlalu kebarat-baratan baik dari cara dia memimpin sampai pada kasus pelecehan agama tersebut. Gaya kepemimpinan Ahok yang keras, blak-blakan, metode pendekatannya dengan pegawai dan masyarakat yang tajam, dan sebagainya dinilai kurang pas dengan budaya Indonesia terutama tanah Jawa. Sampai pada kejadian dimana Ahok menyinggung agama lain dalam pidatonya. Ia kurang memikirkan bahwa ia berada di negara dengan mayoritas Islam konservatif dan negara yang menerapkan hukum adat dengan sangat baik. apa yang dilakukan Ahok tidak akan jadi masalah jika ia tinggal di Barat yang sekuler. Karena “terlalu keBaratan” ini kemudian ia dipermasalahkan dengan segala macam cara. Mengapa dengan segala macam cara? Karena adanya gap waktu yang cukup jauh dari hari ia melecehkan sampai hari ia dilaporkan. Selain itu kasus ini menguap dikarenakan adanya rekayasa video pidato Ahok yang diunggah oleh oknum tertentu. Dengan latar belakang inilah Ahok menyedot kepedulian *international society* meskipun pada akhirnya mereka mengalami “kekalahan” dalam melawan identitas lokal.

Identitas lokal mampu mempertahankan posisinya bahkan “menyerang balik” gangguan wacana global. Melalui *speech act* yang dilakukan baik pimpinan kelompok konservatis maupun pendukung mereka mampu mengumpulkan masa untuk bergabung mendukung penuntutan Ahok. Sedangkan para pendukung wacana global mengalami kekalahan jumlah dan jarak dengan dibanding pendukung konservatis. Selain itu melalui kelompok konservatis Islam

pula kasus pelecehan agama ini disekritisasi sehingga menjadi masalah mendesak yang harus segera diselesaikan dan jika tidak maka akan mengganggu kestabilan sosial di Indonesia. Ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang turun langsung dalam demonstrasi penuntutan Ahok di Jakarta. Pemerintah tidak mungkin acuh pada “ancaman” ini sehingga mereka dengan segera menggelar sidang untuk Ahok, selain itu partai-partai politik juga tidak bisa menentang tuntutan masyarakat. Dengan menggunakan rezim kebenaran dalam meneliti kasus, riset ini membuktikan kegagalan norma global dalam membangun relasi dengan ruang sistem di Indonesia baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Mereka gagal membentuk wacana global di Indonesia karena adanya identitas konservatis lokal yang mampu melawan sehingga mempertahankan nilai yang telah ada. Namun selain itu riset ini juga secara tidak langsung juga membuktikan bahwa ternyata pemerintah Indonesia juga gagal dalam mengontrol asimilasi nilai global dan lokal. Dengan bentuk negara demokrasi, pemerintah Indonesia tidak bisa menjadi penengah yang tepat antara kedua gagasan. Tidak hanya karena menganut demokrasi Barat namun dengan gelombang globalisasi yang kuat, pemerintah tidak bisa mencegah masuknya nilai global di seluruh sistem yang ada di Indonesia baik sosial, ekonomi, dan politik. Namun di sisi lain identitas konservatis Islam juga sudah sangat kuat berada dan mempengaruhi sistem-sistem di Indonesia juga dari masyarakat sampai dengan hukum yang berlaku.

### **Kesimpulan**

Melalui riset ini didapatkan bukti bahwa perdebatan dua gagasan benar terjadi di dunia kontemporer, seperti apa yang telah di ramalkan Samuel Huntington. Setelah dunia lepas dari perdebatan ideologi yang berimplikasi pada pecah perang antara kerajaan-kerajaan, kini dunia masuk pada pertarungan baru antar identitas. Riset ini membuktikan bahwa kita telah memasuki *clash of civilization* karena bentrok antar gagasan-gagasan yang mengisi dunia telah terjadi, dan salah satunya ada pada kasus pelecehan agama yang dilakukan Ahok.

Riset ini memberikan fakta betapa keras usaha gagasan-gagasan global untuk masuk ke Indonesia. Baik gagasan dari hak asasi manusia sampai demokrasi. *the West* berusaha melakukan diskursus gagasan-gagasan mereka melalui berbagai pintu. Gagasan global berusaha masuk pada kasus pelecehan agama 2017 yang dilakukan Ahok dengan membawa poin kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi. Bahkan pada akhirnya mereka memunculkan isu kejahatan kemanusiaan–kejahatan politik–karena suara mereka mengenai kebebasan berpendapat tidak diindahkan. Untuk menunjukkan kepedulian mereka pada demokrasi di Indonesia, *international society* mengirimkan advokat-advokatnya untuk

mengawal langsung jalannya peradilan untuk Ahok, aksi damai untuk menuntut keadilan bagi Ahok juga dilakukan di berbagai negara, kemudian beberapa lembaga pemerintah the West juga mengangkat isu ini ke parlemen-parlemen mereka.

Sayangnya usaha-usaha mereka mendapatkan perlawanan yang kuat dari dalam, yaitu dari gagasan konservatis Islam yang dibawa oleh gerakan dan organisasi non pemerintah di Indonesia. *Counter discourse* yang dilakukan kelompok konservatis lokal Indonesia, dengan cara membentuk rezim kebenaran, didukung oleh sistem yang ada. Kelompok konservatis mampu memenangkan media massa, yang kemudian mampu membentuk opini masyarakat untuk sesuai dengan apa yang mereka percaya. Dukungan ini menjadikan kasus pelecehan agama menjadi sangat *urgent* dan butuh untuk diselesaikan dengan segera. Sehingga peradilan untuk Ahok tanpa disadari oleh seluruh masyarakat baik domestik maupun global, merupakan hasil dari diskursus “kebenaran” yang dibentuk konservatis Islam di Indonesia. Sehingga pada akhirnya kegagalan masyarakat internasional untuk mengadvokasi, membela Ahok gagal terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andersen, M. L., & Taylor, H. F. (2008). *Sociology: Understanding a Diverse Society*. USA: Thomson Wadsworth.
- Anheier, H., Glasius, M., & Kaldor, M. (2001 ). *Global Civil Society*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Brock, G. (2009). *Global Justice: A Cosmopolitan Account*. Oxford: Oxford University Press.
- Burchill, S. (2005). *Theories of International Relations*. New York: Palgrave Macmillan.
- Chandler, D. (2004). *Constructing Global Civil Society: Morality and Power in International Relations*. New York: Palgrave Macmillan.
- Commins, D. (2006). *The Wahhabi Mission and Saudi Arabia*. New York: Palgrave Macmillan.
- Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Heywood, A. (2007). *Political Ideologies; An Introduction*. United Kingdom: Palgrave Macmillan.
- Huntington, S. P. (1996). *The Clash of Civilizations and The Remaking of world Order*. New York: Simon & Schuster Inc.
- Keeley, J. F. (2015). Toward a Foucauldian Analysis of International Regime. *International Organization*.
- Küng, H. (1996). *Yes to a Global Ethic*. London: Continuum Intl Pub Group.
- Mas'oeed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

### Jurnal

- Adiwilaga, R. (2017). Gerakan Islam Politik dan Proyek Historis Penegakan Islamisme Di Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*.
- Afandi, A. K. (2012). Konsep Kekuasaan Michel Foucault. *Teosofi: Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 131-149.

- Choudhary, K. (2004). *Global Civil Society, Globalization and Nation-State. ISTR Conference* (hal. 14). Toronto: ISTR Web.
- Mahfudz, M. (2016). Implikasi Pemahaman Tafsir Al-Qur'an Terhadap Sikap Keberagamaan. *Tafsere*, 122-148.
- Nu'ad, I. A. (2016). Islam Kanan: Gerakan dan Eksistensinya di Indonesia. *Epistemé*, 49-66.
- Weir, L. (2008). The Concept of Truth Regime. *Canadian Journal of Sociology*, 367-389.
- Wirasenjaya, Ade. (2012). Strukturisasi Norma: Pengarusutamaan Gagasan Neoliberal dalam Pembangunan di Negara Pasca-Kolonial (Pengalaman Amerika Latin dan Asia). [10.22146/jsp.10920](https://doi.org/10.22146/jsp.10920).
- Wirya, A. (2013). Rezim Kebenaran Rasionalisme dalam Diskursus Kegilaan dan Tindakan Pendisiplinan Pasung sebagai Kejahatan. *Kriminologi Indonesia*, 1-19.
- Woodward, M., Yahya, M., Rohmaniyah, I., Coleman, D. M., Lundry, C., & Amin, A. (2014). The Islamic Defenders Front: Demonization, Violence and the State in Indonesia. *Cont Islam: Springer*, 153–171.

#### Web

- Abdurrazaq, H. (2018, Februari 03). *Islam Dan Integrasi Masyarakat Global*. Retrieved from Geotimes: <https://geotimes.co.id/opini/islam-dan-integrasi-masyarakat-global/>
- AI Staff. (n.d.). *LGBTI Rights*. Retrieved from Amnesty International: <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/lgbt-rights/>
- Amindoni, A. (2018, Februari 19 ). *Serangan Terhadap Tokoh Agama dan Tempat Ibadah, Polisi 'Janji Berikan Pengamanan'*. Retrieved from BBC Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43068208>
- Artharini, I. (2016, Oktober 07 ). *Pelaporan Ahok Atas Tuduhan Menghina Agama dan Pemilih*. Diambil kembali dari BBC News Indonesia: [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/10/161007\\_indonesia\\_ahok\\_laporan](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161007_indonesia_ahok_laporan)
- Aspinall, E., Muhtadi, B., Fossati, D., & Warburton, E. (2018, April 24). *Mapping the Indonesian Political Spectrum*. Retrieved from New Mandala: <https://tirto.id/corak-ideologi-partai-partai-di-indonesia-cJKc>
- Aziz, N. (2017, Februari 21 ). *'Bersifat Politis', NU dan Muhammadiyah Tidak Ikuti Aksi 212 di depan DPR*. Retrieved from BBC Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39026197>
- Bales, K. (t.thn.). *Anti Slavery*. Diambil kembali dari Anti Slavery: <https://www.antislavery.org/>
- Bauer, R. (2017, Maret 20 ). *Social Development and The Global Community: Why The Legitimacy of The Change Process Matters*. Diambil kembali dari The World Bank: <https://blogs.worldbank.org/publicsphere/1>
- BBC Staff. (2013, September 07 ). *Semua Acara Miss World Dilaksanakan di Bali*. Retrieved from BBC Indonesia: [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2013/09/130907\\_missworld\\_pindah](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/09/130907_missworld_pindah)
- BBC Staff. (2017, Januari 20 ). *Front Pembela Islam: Indonesia 'bukan negara demokrasi'*. Retrieved from BBC Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38688068>
- DetikNews Staff. (2008, Februari 26). *Diancam Dibunuh, Jema'at Ahmadiyah Ngadu ke Komnas HAM*. Retrieved from DetikNews: <https://news.detik.com/berita/d-900331/diancam-dibunuh-jemaat-ahmadiyah-ngadu-ke-komnas-ham>
- DW Staff . (2017, September 08). *Survey: Muslim Indonesia Semakin Konservatif*. Diambil kembali dari Deutsche Welle: <http://amp.dw.com/id/survey-muslim-indonesia-semakin-konservatif/a-40410411>

- DWStaff. (2014, May 25). *Konservatif Kuasai Parlemen Eropa*. Retrieved from Deutsche Welle: <https://www.dw.com/id/konservatif-kuasai-parlemen-eropa/a-17662217>
- Fahmi, Y., & Ali, M. (2016, November 14). *Muhammadiyah: Pendapat Syafii Maarif soal Ahok Tak Kontroversial*. Diambil kembali dari Liputan6: <https://www.liputan6.com/news/read/2651283/muhammadiyah-pendapat-syafii-maarif-soal-ahok-tak-kontroversial>
- Fauziah, S. (2017, Februari 28 ). *Ini Isi Kesaksian Habib Rizieq dalam Persidangan ke-12 Ahok*. Retrieved from Brilio: <https://www.brilio.net/serius/ini-isi-kesaksian-habib-rizieq-dalam-persidangan-kedua-belas-ahok-1702282.html>
- Hatta, R. T. (2017, Januari 30). *Survei: NU Tradisionalis, Muhammadiyah Moderat, FPI Keras*. Diambil kembali dari Liputan6: <https://www.liputan6.com/news/read/2841850/survei-nu-tradisionalis-muhammadiyah-moderat-fpi-keras>
- Hookway, J. (2017, September 15). *FPI dan Kemunculan Islam Garis Keras di Indonesia*. Diambil kembali dari Mata-Mata Politik: <https://www.matamatapolitik.com/fpi-dan-kemunculan-islam-garis-keras-di-indonesia/>
- Keteng, A. M. (2013, September 14). *Puncak Miss World di Sentul, Ketua FPI: Kita Siap Perang!* Retrieved from Liputan6: <https://www.liputan6.com/news/read/692881/puncak-miss-world-di-sentul-ketua-fpi-kita-siap-perang>
- Kresna, M. (2017, Maret 08 ). *Memenjarakan Gafatar*. Retrieved from Tirto: <https://tirto.id/memenjarakan-gafatar-ckkq>
- Kwok, Y. (2017, May 09). *A Top Christian Official in Indonesia Has Been Given an Unexpectedly Harsh Sentence for 'Blaspheming Islam'*. Diambil kembali dari Times: <http://time.com/4770985/jakarta-governor-ahok-christian-jail-blasphemy-islam/>
- Maharani, S. (2017, Mei 13). *Pengamat: Vonis Ahok Menunjukkan Demokrasi Indonesia Mundur*. Diambil kembali dari Tempo: <https://nasional.tempo.co/read/874985/pengamat-vonis-ahok-menunjukkan-demokrasi-indonesia-mundur/full&view=ok>
- Malau, S. (2017, Mei 09). *Ini Kisah Perjalanan Kasus Ahok Hingga Vonis 2 Tahun Penjara*. Diambil kembali dari Tribunnews: <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/05/09/ini-kisah-perjalanan-kasus-ahok-hingga-vonis-2-tahun-penjara?page=2>
- Manurung, M. Y. (2018, Februari 22 ). *Amnesty Internasional: Ahok Korban Politik Kebencian di Pilkada*. Retrieved from Tempo: <https://nasional.tempo.co/read/1063412/amnesty-internasional-ahok-korban-politik-kebencian-di-pilkada/full&view=ok>
- MI Administrator. (2018, Januari 24). *Gaya Hidup LGBT Berbahaya bagi Bangsa*. Retrieved from Media Indonesia: <http://mediaindonesia.com/read/detail/142118-gaya-hidup-lgbt-berbahaya-bagi-bangsa>
- Muhtadin, A. (2017 , November 11 ). *Tabligh Akbar Garut, Ketum FPI Ingatkan Umat Kekuatan Ukhuwah*. Retrieved from Hidayatullah: <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/11/11/127763/tabligh-akbar-garut-ketum-fpi-ingatkan-umat-kekuatan-ukhuwah.html>
- Novianto, R. (2018, September 04 ). *Persekusi atas Nama Agama, Bagaimana dengan Pemulihan Hak Korban?* Retrieved from KBR Indonesia: [https://kbr.id/nasional/09-2018/persekusi\\_atas\\_nama\\_agama\\_bagaimana\\_dengan\\_pemulihan\\_hak\\_korban/97168.html](https://kbr.id/nasional/09-2018/persekusi_atas_nama_agama_bagaimana_dengan_pemulihan_hak_korban/97168.html)

- Posner, E. (2014, Desember 04 ). *The Case Against Human Rights*. Diambil kembali dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/news/2014/dec/04/-sp-case-against-human-rights>
- Samosir, H. A. (2017, 05 02). *WNI di Berbagai Penjuru Dunia Akan Gelar Aksi Dukong Ahok*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170512163552-134-214386/wni-di-berbagai-penjuru-dunia-akan-gelar-aksi-dukung-ahok>
- SindoNews. (2018, Februari 21 ). *Negara dengan Perbudakan Modern Terbanyak di Dunia*. Diambil kembali dari SindoNews: <https://international.sindonews.com/read/1283606/45/negara-dengan-perbudakan-modern-terbanyak-di-dunia-1519112527/>
- Siregar, L. P. (2017, Maret 20). *Politik Ekstrem Kanan: Brexit, Trump, Wilders, dan Pilkada Jakarta?* Retrieved from BBC Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39303427>
- Suryowati, E. (2017, 05 12). *Aksi Dukungan Untuk Ahok Marak, Ini Kata Wakil Ketua DPR*. Diambil kembali dari Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/12/16430601/aksi>
- Sutari, T. (2017, 05 12). *Ribuan KTP Warga Terkumpul untuk Penanggulangan Penahanan Ahok*. Diambil kembali dari CNNIndonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170511193034-20-214177/ribuan-ktp-warga-terkumpul-untuk-penanggulangan-penahanan-ahok>
- Syakur, M. A. (2017, Agustus 19 ). *Pidato Habib Rizieq: Diakui atau Tidak, FPI Telah Jadi Ikon Amar Makruf Nahi Mungkar*. Retrieved from Hidayatullah: <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/08/19/121790/pidato-habib-rizieq-diakui-atau-tidak-fpi-telah-jadi-ikon-amar-makruf-nahi-mungkar.html>
- Syakur, M. A. (2017, Agustus 22 ). *Ini Pidato Habib Rizieq Jelang Kedatangan Sekjen Partai Komunis*. Retrieved from Hidayatullah: <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2017/08/22/121992/ini-pidato-habib-rizieq-jelang-kedatangan-sekjen-partai-komunis.html>
- Tempo Staff. (2018, November 21 ). *Diskriminasi dan Politik Identitas*. Retrieved from Tempo: <https://kolom.tempo.co/read/1148172/diskriminasi-dan-politik-identitas>
- Terbaru, B. (2016, Oktober 06). *Ini Pidato Lengkap Ahok di Kepulauan Seribu*. Diambil kembali dari YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=8hAZzCV7I3U&t=1107s>
- Tuwo, A. G. (2017, Mei 12 ). *Aksi Dukong Ahok Digelar di 4 Benua, Negara Mana Saja?* Diambil kembali dari Liputan6: <https://www.liputan6.com/global/read/2949033/aksi-dukung-ahok-digelar-di-4-benua-negara-mana-saja>
- Vit, J., & Erlangga, A. M. (2016, November 18). *Human Rights Watch: Kasus Ahok Adalah 'Kemunduran Bagi Demokrasi Indonesia*. Diambil kembali dari VICE: [https://www.vice.com/id\\_id/article/8qgg73/kasus-ahok-adalah-kemunduran-bagi-demokrasi-indonesia](https://www.vice.com/id_id/article/8qgg73/kasus-ahok-adalah-kemunduran-bagi-demokrasi-indonesia)
- Wahid, A. B. (2017, Mei 16 ). *WNI di Atlanta dan Washington DC Gelar Aksi Dukungan untuk Ahok*. Diambil kembali dari detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-3502714/wni-di-atlanta-dan-washington-dc-gelar-aksi-dukungan-untuk-ahok>
- Wardah, F. (2018, November 23). *Diskriminasi Etnis dan Ras Diperkirakan Meningkat*. Retrieved from VOA AIndonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/diskriminasi-etnis-dan-ras-diperkirakan-meningkat-/4670735.html>
- Yani, A. (2018, NOVEMBER 20 ). *Integrasi Hukum Nasional Dengan Syariat Islam*. Retrieved from Kantor Berita Politik RMOL:

<https://www.rmol.co/read/2018/11/20/367054/Integrasi-Hukum-Nasional-Dengan-Syariat-Islam->

**Lain-Lain**

Lie, B. (2017, 05 14). Aksi Dukong Ahok Digelar di Los Angeles. (P. Puspa, Pewawancara)  
Yusof, M. I., Kadir, M. N., Ibrahim, M. b., Ahmad, K. b., & Noor, M. b. (2015). *Hadis-Hadis Sahih Berkaitan Perlakuan LGBT*. Retrieved from Jabatan Kemajuan Islam Malaysia: [http://www.islam.gov.my/images/ePenerbitan/Hadis-hadis\\_Sahih\\_Berkaitan\\_Perlakuan\\_LGBT.pdf](http://www.islam.gov.my/images/ePenerbitan/Hadis-hadis_Sahih_Berkaitan_Perlakuan_LGBT.pdf)